

LAPORAN BPK RI, Pemda Ramai-Ramai Turun Peringkat

SEJUMLAH Pemerintah Daerah (Pemda) ramai-ramai turun peringkat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas sejumlah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2013. Dalam catatan redaksi, sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun sebelumnya. Misalnya, Kota Palu, Kabupaten Poso, Parigi Moutong, Sigi dan Pemerintah Provinsi Sulteng. Prestasi yang diraih oleh sejumlah Pemda itu, diberi apresiasi tersendiri oleh BPK RI Perwakilan Sulteng. Namun prestasi yang diraih tersebut, seolah sirna menyusul turunya peringkat sejumlah pemerintah daerah, kecuali pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol yang berhasil naik peringkat menjadi opini WDP karena tahun sebelumnya hanya memperoleh opini disclaimer. Sebaliknya, turun peringkat dari WTP menjadi WDP, yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Tolotoli, Morowali, Parigi Mautong dan Sigi. Untuk Kabupaten Banggai, Donggala, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-una, belum memperoleh laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2013 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Kepala BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, M Bayu Sabartha, Senin (26/5/2014), saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulteng tahun anggaran 2013, mengatakan, permasalahan signifikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tahun 2013 yang berpengaruh pada kewajaran laporan keuangannya adalah penyajian aset tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp996,92 miliar. "Dalam hal ini BPK tidak dapat melakukan pengujian atas asersi kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan karena kelemahan pencatatan dan penginputan dalam data base sistem manajemen daerah (Simda) barang milik daerah," jelas Bayu. Sementara itu, Bupati Sigi Aswadin Randalembah mengatakan, tahun ini memang terhadang oleh permasalahan aset seperti lahan sekolah, mengingat dahulu tidak ada bukti surat hibah maupun tanah. Sehingga, ini penyebab Pemkab Sigi memperoleh opini WDP. "ini menjadi kendala mempertahankan opini WTP," kata Aswadin BUOL, KELOLA KEUANGAN BERBASIS IT Kerja keras yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Buol dalam pengelolaan keuangan aset daerah berbuah manis. Jika tahun sebelumnya BPK RI memberikan opini disclaimer pada laporan keuangan Pemkab Buol, tahun 2013 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Bupati Buol, Amirudin Rauf, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Dikatakan Bupati yang akrab disapa Dokter Rudi itu, pencapaian tersebut. Dikatakan Bupati yang akrab disapa Dokter Rudi itu, pencapaian tersebut merupakan kerja keras seluruh jajaran yang ada di Pemkab Buol. "Ini berawal dari komitmen bersama seluruh penyelenggara pemerintahan taat atas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," ujar Dokter Rudi, Selasa (27/5/2014). Diungkapkan Dokter Rudi, selama satu tahun terakhir pihaknya telah berusaha keras melakukan penataan aset daerah, yang ada pada tahun 2012 menjadi salah satu pemicu disclaimer. "Satu tahun kita lakukan sensus aset, pembukuan dan penarikan untuk aset pembukuan dan penarikan untuk aset yang dikuasai mantan pejabat atau pegawai. Hasilnya lebih delapan puluh persen aset kita yang tidak tertata sejak awal pemekaran empat belas tahun lalu, kini mulai tertata. Kenapa WDP? Karena harus kita akui

penataan ini belum selesai dan kita akan terus tingkatkan,” katanya. Dengan kerja keras semua pihak dan taat aturan, Dokter Rudi optimis tahun depan Pemkab Buol akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Selain membenahi pengelolaan aset, Pemkab Buol juga melakukan terobosan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi (IT). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol membuat sistem pengelolaan keuangan secara *online* dan terhubung dengan BPK RI dan Kementerian Keuangan. “Data dan arus pengelolaan keuangan *online* dan ditampilkan dilayar di kantor bupati. Semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada yang punya urusan keuangan dengan Pemkab Buol, bisa langsung mengeceknya melalui jaringan internet, tidak perlu repot-repot datang dan berurusan dengan bendahara.

Sumber : Mercusuar Rabu, Edisi 28 Mei 2014 Halaman 01 Kolom17-24; Hal. 11 Kol. 04-06

Catatan :

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)